

PEKERJAAN ADA, TETAPI **GOOD JOBS**

MASIH KURANG:

TANTANGAN PASAR KERJA INDONESIA



Oleh Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan Ada, tetapi Good Jobs Masih Kurang
- Tantangan Pasar Kerja Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

1 April 2026

PEKERJAAN ADA, TETAPI GOOD JOBS MASIH KURANG: TANTANGAN PASAR KERJA INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas paradoks sosial-ekonomi Indonesia pada awal 2026, yaitu penurunan kemiskinan resmi yang berlangsung bersamaan dengan bertahannya kerentanan rumah tangga. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang, lebih rendah daripada Maret 2025 sebesar 8,47 persen dan September 2024 sebesar 8,57 persen. Pada saat yang sama, rasio Gini pengeluaran turun menjadi 0,363, menandakan distribusi pengeluaran yang secara statistik membaik. Ekonomi Indonesia juga tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta. Namun, kemajuan ini belum otomatis menjadi rasa aman ekonomi yang luas. Kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh di atas perkotaan 6,60 persen. Rata-rata upah buruh November 2025 baru sekitar Rp3,33 juta, inflasi tahunan sempat mencapai 4,76 persen pada Februari 2026, dan Bank Dunia menunjukkan bahwa porsi pekerjaan kelas menengah turun dari 14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023, dengan hampir 60 persen pekerja masih berada dalam pekerjaan informal. Makalah ini berargumen bahwa wajah ganda ekonomi Indonesia lahir dari perbedaan antara keberhasilan agregat dan pengalaman rumah tangga: kemiskinan turun dalam statistik, tetapi kerentanan bertahan karena kualitas pekerjaan belum cukup baik, biaya hidup masih menekan, tabungan dan aset rumah tangga masih tipis, serta manfaat pertumbuhan belum menyebar merata antarwilayah dan

antarkelompok sosial. Dengan demikian, tantangan utama Indonesia bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, melainkan memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga agar tidak mudah jatuh kembali ketika menghadapi guncangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: kemiskinan, kerentanan, pasar kerja, informalitas, daya beli, kelas menengah, ketimpangan wilayah, Indonesia.

Kemiskinan yang Turun, Kerentanan yang Bertahan: Wajah Ganda Ekonomi Indonesia

Pendahuluan

Indonesia memasuki 2026 dengan sejumlah indikator yang, pada pandangan pertama, layak dibaca optimistis. Ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi daripada 2024 yang tumbuh 5,03 persen. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar USD 5.083,4. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh 7,03 persen, tertinggi di antara komponen utama PDB. Dalam bahasa makroekonomi, fondasi pertumbuhan Indonesia masih relatif terjaga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perkembangan distribusi dan kemiskinan juga menunjukkan arah yang positif. BPS melaporkan bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang. Sementara itu, rasio Gini pengeluaran turun menjadi 0,363 dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Pangsa pengeluaran 40 persen penduduk terbawah juga meningkat menjadi 19,28 persen. Secara statistik, semua ini menandakan perbaikan distribusi pengeluaran dan penurunan kemiskinan yang nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, narasi ekonomi rumah tangga tidak selalu berjalan seirama dengan indikator makro dan distribusi tersebut. Banyak keluarga masih merasa hidup mereka rapuh: pendapatan belum cukup memberi rasa aman, pekerjaan yang tersedia belum cukup stabil atau produktif, dan sedikit gangguan harga atau penghasilan masih dapat mengguncang keseimbangan keuangan keluarga. Di sinilah muncul wajah ganda ekonomi Indonesia. Pada satu sisi, negara tampak bergerak maju dalam statistik. Pada sisi lain, masyarakat masih merasakan kerapuhan dalam kehidupan sehari-hari. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Paradoks tersebut bukan sekadar persoalan persepsi. Ia memiliki akar struktural. BPS menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh di atas kemiskinan perkotaan sebesar 6,60 persen. Ekonomi Indonesia masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa yang menyumbang 56,93 persen ekonomi nasional pada 2025. Di sisi lain, Bank Dunia menilai bahwa porsi pekerjaan kelas menengah justru menurun dari 14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023, hampir 60 persen pekerja masih informal, dan sekitar 70 persen pekerja berada di sektor-sektor dengan pendapatan rendah. Artinya, kemajuan agregat belum otomatis diterjemahkan menjadi keamanan ekonomi yang luas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini bertujuan menjelaskan mengapa kemiskinan resmi dapat menurun sementara kerentanan ekonomi tetap bertahan. Argumen utamanya adalah bahwa Indonesia sedang mengalami kemajuan pada tingkat agregat, tetapi belum cukup dalam pada tingkat struktural. Penurunan kemiskinan dan membaiknya distribusi pengeluaran memang nyata, tetapi belum disertai perluasan pekerjaan berkualitas, pertumbuhan upah riil yang kuat, penyebaran pertumbuhan yang lebih merata antarwilayah, dan penguatan ketahanan rumah tangga terhadap guncangan. Karena itu, fokus analisis harus bergeser dari sekadar “berapa banyak penduduk miskin” ke pertanyaan yang lebih substantif: “seberapa

aman rumah tangga Indonesia di atas garis kemiskinan?" ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kerangka Konseptual: Kemiskinan, Kerentanan, dan Keamanan Ekonomi

Dalam analisis kebijakan publik, kemiskinan biasanya dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar. Pengukuran resmi BPS berbasis garis kemiskinan sangat penting karena memberi batas yang konsisten untuk memantau perubahan kesejahteraan paling dasar dari waktu ke waktu. Jika persentase penduduk miskin turun, maka secara definisional lebih sedikit orang berada di bawah ambang konsumsi minimum. Dari sisi kebijakan, itu adalah capaian nyata. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Akan tetapi, kerentanan ekonomi adalah konsep yang lebih luas. Rumah tangga yang rentan belum tentu miskin hari ini, tetapi mempunyai peluang tinggi untuk jatuh miskin ketika terkena shock. Shock itu dapat berupa kenaikan harga pangan, sakit, kehilangan kerja, penurunan omzet usaha, gagal panen, atau kewajiban pengeluaran besar yang mendadak. Dalam ekonomi yang banyak ditopang oleh pekerjaan informal, upah rendah, dan tabungan rumah tangga yang terbatas, kerentanan menjadi kategori yang sangat penting, bahkan mungkin lebih mencerminkan realitas sosial daripada angka kemiskinan itu sendiri. Argumen ini sejalan dengan temuan Bank Dunia bahwa Indonesia masih memiliki basis pekerjaan informal yang besar dan kelas menengah pekerja yang justru menyusut.

Perbedaan antara kemiskinan dan kerentanan juga menjelaskan mengapa data dan pengalaman sosial dapat tampak bertentangan. Sebuah rumah tangga dapat keluar dari garis kemiskinan karena pengeluarannya naik sedikit di atas ambang minimum, tetapi tetap belum memiliki bantalan yang memadai. Bila pendapatan mereka sangat bergantung pada pekerjaan tidak tetap, sementara biaya hidup sering naik, maka secara praktis mereka masih hidup dalam kecemasan ekonomi. Mereka "lebih

baik” menurut statistik, tetapi belum “aman” menurut pengalaman. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kerangka ini penting untuk membaca Indonesia pada 2026. Di satu sisi, Indonesia membukukan pertumbuhan, penurunan kemiskinan, dan membaiknya distribusi pengeluaran. Di sisi lain, struktur pekerjaan, distribusi spasial peluang, serta tekanan biaya hidup menunjukkan bahwa banyak rumah tangga masih belum memiliki keamanan ekonomi yang cukup. Maka, indikator agregat dan pengalaman mikro tidak perlu dibaca sebagai saling meniadakan. Keduanya justru menunjukkan dua lapisan realitas yang berbeda. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Wajah Pertama: Kemiskinan Resmi Turun dan Distribusi Pengeluaran Membaik

Bukti paling jelas dari kemajuan agregat datang dari data kemiskinan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 0,49 juta orang. Dibandingkan September 2024, pengurangannya sekitar 0,70 juta orang. Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga berhasil melampaui ambang minimum konsumsi yang dipakai untuk mengukur kemiskinan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data distribusi pengeluaran juga bergerak ke arah yang sama. Rasio Gini pengeluaran turun menjadi 0,363 pada September 2025, baik secara nasional maupun di wilayah perkotaan dan perdesaan. Pangsa pengeluaran 40 persen penduduk terbawah juga meningkat menjadi 19,28 persen. Dalam istilah BPS, angka ini masuk kategori “tingkat ketimpangan rendah” menurut klasifikasi pangsa pengeluaran Bank Dunia. Artinya, dilihat dari sisi pembagian konsumsi rumah tangga, Indonesia mengalami perbaikan yang cukup berarti. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kemajuan itu didukung oleh kondisi pertumbuhan yang masih terjaga. Ekonomi 2025 tumbuh 5,11 persen, triwulan IV-2025 tumbuh 5,39 persen

secara tahunan, dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta. Pertumbuhan ini penting karena penurunan kemiskinan dalam banyak kasus memang memerlukan ekspansi ekonomi. Tanpa pertumbuhan, ruang untuk memperbaiki kesejahteraan rumah tangga biasanya jauh lebih sempit. Dengan demikian, turunnya kemiskinan dan membaiknya distribusi pengeluaran pada 2025 tidak terjadi di ruang hampa; keduanya ditopang oleh ekonomi yang memang masih bergerak. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Selain pertumbuhan, sisi permintaan domestik juga menunjukkan ketahanan. Survei Konsumen Bank Indonesia Februari 2026 memperlihatkan keyakinan konsumen tetap kuat. Penjualan eceran Februari 2026 juga diperkirakan tumbuh 6,9 persen secara tahunan dan 4,4 persen secara bulanan, terutama karena Ramadan dan persiapan Idulfitri. Ini berarti konsumsi rumah tangga belum melemah secara luas. Secara agregat, masyarakat masih membelanjakan uangnya dan melihat kondisi ekonomi dengan tingkat optimisme tertentu. ([Bank Indonesia](#))

Dengan kata lain, jika hanya memakai indikator-indikator ini, maka Indonesia bisa dibaca sedang berada di jalur yang cukup baik: kemiskinan turun, distribusi membaik, pertumbuhan bertahan, konsumsi masih hidup, dan sentimen masih positif. Namun, pembacaan tersebut baru menggambarkan wajah pertama. Wajah kedua muncul ketika kita menelusuri kualitas pekerjaan, biaya hidup, distribusi spasial, dan kemampuan rumah tangga bertahan dari shock. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Wajah Kedua: Kerentanan Ekonomi Bertahan

Wajah kedua ekonomi Indonesia terlihat ketika statistik yang membaik itu dibandingkan dengan indikator ketahanan rumah tangga. Pertama, kemiskinan perdesaan masih 10,72 persen, jauh lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan 6,60 persen. Ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan nasional menutupi disparitas ruang yang masih lebar. Banyak rumah tangga di perdesaan masih berada dalam kondisi yang secara

absolut lebih lemah, meskipun tingkat ketimpangan pengeluarannya tampak lebih rendah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kedua, pasar kerja Indonesia masih didominasi pekerjaan yang belum cukup kuat untuk menciptakan rasa aman. BPS menunjukkan pengangguran terbuka pada November 2025 sebesar 4,74 persen dan jumlah penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang, tetapi rata-rata upah buruh baru sekitar Rp3,33 juta. Artinya, kuantitas pekerjaan membaik, tetapi kualitas pendapatannya belum memadai bagi banyak rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup yang lebih tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketiga, Bank Dunia menunjukkan bahwa masalah Indonesia bukan sekadar lapangan kerja, melainkan kekurangan **good jobs**. Pangsa pekerjaan kelas menengah turun dari 14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023. Penciptaan kerja dalam beberapa tahun terakhir terkonsentrasi pada sektor berupah rendah seperti perdagangan besar dan eceran serta pertanian. Hampir 60 persen pekerja masih berada dalam pekerjaan informal, dan sekitar 70 persen pekerja berada di sektor yang menghasilkan kurang dari IDR 8 juta per pekerja per bulan. Temuan ini menjelaskan mengapa banyak rumah tangga merasa masih rapuh meskipun mereka bekerja dan tidak tergolong miskin.

Keempat, biaya hidup tetap menjadi sumber tekanan. Inflasi tahunan Februari 2026 mencapai 4,76 persen, sebelum turun menjadi 3,48 persen pada Maret 2026. BI menilai inflasi volatile food Februari 2026 sebesar 4,64 persen, didorong oleh kenaikan harga pangan dan gangguan cuaca. Untuk rumah tangga rentan, terutama yang sebagian besar pendapatannya habis untuk kebutuhan pokok, tekanan seperti ini sangat berarti. Mereka mungkin telah keluar dari garis kemiskinan, tetapi belum punya bantalan yang cukup untuk menyerap kenaikan biaya hidup. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kelima, struktur pertumbuhan Indonesia sendiri masih sangat terkonsentrasi. Pulau Jawa menyumbang 56,93 persen ekonomi nasional

pada 2025. Konsentrasi ini berarti kesempatan kerja formal, investasi, dan jasa bernilai tinggi juga lebih berat di pusat-pusat pertumbuhan tertentu. Rumah tangga di luar pusat-pusat itu tidak selalu mendapat akses yang sama terhadap pekerjaan berkualitas atau pasar yang besar. Karena itu, kemajuan agregat nasional bisa hidup berdampingan dengan rasa tertinggal di banyak wilayah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pasar Kerja sebagai Jantung Kerentanan

Jika harus menunjuk satu bidang yang paling kuat menjelaskan mengapa kerentanan bertahan, maka bidang itu adalah pasar kerja. BPS memang menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menambah pekerjaan dan menurunkan pengangguran. Namun Bank Dunia menegaskan bahwa struktur pekerjaan tersebut belum cukup menghasilkan keamanan ekonomi yang luas. Dari 85 juta pencari nafkah pada 2018, hanya sekitar 13 juta yang memiliki pendapatan cukup untuk menopang keluarga berempat pada standar kelas menengah, dan pangsa pekerjaan kelas menengah kemudian menurun ke 8,4 persen pada 2023. Ini berarti bahwa bahkan ketika ekonomi tumbuh, jalur menuju kelas menengah justru belum melebar.

Fenomena ini penting karena kelas menengah biasanya menjadi bantalan utama terhadap shock. Rumah tangga kelas menengah cenderung memiliki pendapatan lebih stabil, tabungan lebih besar, akses kesehatan dan pendidikan lebih baik, serta kemampuan lebih tinggi untuk menahan kenaikan biaya hidup atau kehilangan pendapatan sementara. Bila pekerjaan kelas menengah justru menyusut, maka banyak rumah tangga akan tetap terjebak dalam posisi antara miskin dan mapan. Mereka tidak miskin resmi, tetapi belum cukup aman untuk disebut kokoh.

Selain itu, informalitas yang tinggi membatasi kemampuan rumah tangga untuk mengubah pendapatan saat ini menjadi keamanan jangka panjang. Pekerjaan informal cenderung lemah dari sisi kontrak, jaminan sosial, akses kredit, dan perlindungan terhadap penurunan permintaan. Seorang pekerja informal bisa cukup sibuk hari ini, tetapi tidak punya kepastian penghasilan

bulan depan. Dalam kondisi seperti itu, satu gangguan kecil saja bisa menghapus seluruh kemajuan yang telah dibuat rumah tangga dalam beberapa bulan terakhir. Inilah yang membuat kerentanan sangat lekat dengan struktur pasar kerja Indonesia.

Masalah ini juga dipengaruhi oleh komposisi investasi. Bank Dunia menilai sekitar 70 persen investasi Indonesia selama 15 tahun terakhir masih mengalir ke sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, ekonomi memang tumbuh, tetapi pekerjaan yang tercipta banyak berada di sektor rendah upah dan rendah produktivitas. Selama mesin pertumbuhan masih seperti ini, Indonesia akan terus menghasilkan rumah tangga yang secara statistik sedikit membaik tetapi secara struktural masih rapuh.

Daya Beli, Inflasi, dan Tipisnya Ruang Aman Rumah Tangga

Kerentanan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh besarnya pengeluaran yang harus ditanggung secara rutin. Di sinilah inflasi menjadi sangat penting. Pada Februari 2026, inflasi year-on-year mencapai 4,76 persen, dengan inflasi inti 2,63 persen dan inflasi volatile food 4,64 persen. Pada Maret 2026, inflasi year-on-year menurun menjadi 3,48 persen, tetapi tekanan bulanan masih ada. Dari sisi teknis, BI menilai sebagian lonjakan Februari dipengaruhi base effect kebijakan diskon tarif listrik tahun sebelumnya. Namun bagi rumah tangga, yang mereka rasakan bukan "base effect", melainkan tagihan dan harga aktual yang harus dibayar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rata-rata upah buruh yang hanya sekitar Rp3,33 juta membuat persoalan ini semakin tajam. Di banyak kota, nominal tersebut harus menutup makanan, transportasi, tempat tinggal, utilitas, pendidikan, dan kebutuhan sosial. Bila sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan rutin, maka sedikit kenaikan harga akan langsung mempersempit ruang gerak. Rumah tangga mungkin tidak langsung jatuh miskin, tetapi mereka kehilangan kemampuan menabung, menunda pembelian penting, atau menahan kejadian darurat. Inilah salah satu wajah paling konkret dari kerentanan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks ini, penurunan kemiskinan dapat dibaca sebagai perbaikan yang masih tipis. Banyak rumah tangga tampaknya berhasil naik sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi belum naik cukup jauh untuk benar-benar aman dari tekanan harga. Mereka tetap sensitif terhadap fluktuasi pangan, transportasi, dan utilitas. Karena itu, kebijakan stabilisasi harga bukan sekadar isu inflasi, melainkan bagian dari strategi menurunkan kerentanan. Rumah tangga akan lebih tahan guncangan bila harga kebutuhan dasar lebih stabil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketimpangan Wilayah sebagai Sumber Kerentanan yang Persisten

Kerentanan ekonomi Indonesia juga perlu dibaca sebagai fenomena spasial. Pertumbuhan ekonomi yang sangat terkonsentrasi di Jawa berarti akses ke pekerjaan formal, industri bernilai tambah tinggi, dan jasa modern juga cenderung terkonsentrasi di wilayah yang sama. Sementara itu, daerah perdesaan dan banyak kawasan luar Jawa masih lebih mengandalkan pertanian, perdagangan lokal, dan aktivitas ekonomi dengan produktivitas yang lebih rendah. Akibatnya, rumah tangga di wilayah yang berbeda hidup di bawah horizon ekonomi yang berbeda pula. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data BPS memperlihatkan paradoks yang menarik. Gini ratio perdesaan lebih rendah daripada perkotaan, tetapi kemiskinan perdesaan jauh lebih tinggi. Artinya, desa bisa terlihat “lebih merata”, tetapi dalam tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Sebaliknya, kota memiliki peluang ekonomi lebih besar, tetapi juga menampilkan ketimpangan lebih tinggi dan biaya hidup yang lebih berat. Karena itu, kerentanan di desa dan di kota memiliki bentuk yang berbeda. Di desa, kerentanan sering bersumber dari rendahnya produktivitas dan sedikitnya peluang diversifikasi pendapatan. Di kota, kerentanan sering muncul dari kombinasi upah yang terbatas dan biaya hidup yang tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketika masyarakat mengatakan bahwa kerentanan masih bertahan, mereka sering merujuk pada pengalaman geografis ini. Warga di luar pusat pertumbuhan dapat merasa bahwa kemajuan nasional belum sepenuhnya

hadir dalam bentuk peluang nyata di wilayah mereka. Sebaliknya, warga di kota besar dapat melihat kemajuan fisik dan konsumsi di sekitar mereka, tetapi tetap merasa tertinggal karena biaya hidup dan ketidakamanan kerja. Dengan demikian, kerentanan bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga persoalan lokasi dalam peta ekonomi nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Mengapa Data dan Pengalaman Sosial Tampak Bertentangan?

Pada dasarnya, data dan pengalaman sosial tidak benar-benar bertentangan. Keduanya hanya mengukur hal yang berbeda. Data BPS tentang kemiskinan dan gini ratio mengukur posisi rumah tangga terhadap ambang minimum konsumsi dan distribusi pengeluaran pada satu waktu tertentu. Pengalaman sosial mengukur sesuatu yang lebih luas: seberapa aman, seberapa stabil, dan seberapa jauh rumah tangga dari kemungkinan jatuh. Karena itu, sebuah rumah tangga dapat “membaik” menurut statistik tetapi “belum lega” menurut pengalaman. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Dunia memberi penjelasan yang membantu: pertumbuhan Indonesia memang masih menghasilkan pekerjaan dan peningkatan standar hidup, tetapi kualitas pekerjaan yang tercipta belum cukup baik untuk memperluas kelas menengah secara kuat. Dalam istilah lain, ekonomi Indonesia masih cukup baik untuk menurunkan kemiskinan, tetapi belum cukup transformatif untuk mengurangi kerentanan secara mendalam. Ini adalah perbedaan penting. Menurunkan kemiskinan dan mengurangi kerentanan bukan proses yang sama, walaupun keduanya saling berkaitan.

Dengan demikian, paradoks yang kita bahas sebenarnya adalah paradoks pembangunan menengah: Indonesia telah cukup maju untuk memperbaiki indikator dasar, tetapi belum cukup jauh untuk memberi rasa aman ekonomi yang luas. Inilah yang dimaksud dengan wajah ganda. Wajah pertama ialah kemajuan statistik yang riil. Wajah kedua ialah kerapuhan rumah tangga yang belum hilang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi Kebijakan: Dari Pengurangan Kemiskinan ke Pembangunan Ketahanan Rumah Tangga

Implikasi pertama adalah bahwa kebijakan sosial Indonesia perlu beranjak dari logika “mengeluarkan orang dari kemiskinan” ke logika “mencegah mereka jatuh kembali”. Ini berarti perlindungan sosial tidak boleh hanya berfokus pada penduduk miskin ekstrem, tetapi juga rumah tangga rentan yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Dukungan kesehatan, pendidikan, bantuan pangan yang responsif terhadap inflasi, dan perlindungan terhadap shock pekerjaan harus menjadi bagian dari strategi anti-kerentanan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi kedua adalah perlunya pergeseran dari **job creation** ke **good jobs creation**. Indonesia sudah relatif berhasil menjaga pengangguran tetap rendah, tetapi kualitas pekerjaan belum cukup baik. Kebijakan industri, investasi, pendidikan vokasi, dan reformasi pasar tenaga kerja perlu diarahkan untuk memperbesar sektor bernilai tambah tinggi yang dapat menghasilkan pendapatan lebih stabil dan lebih tinggi. Tanpa itu, rumah tangga akan terus bekerja keras tanpa pernah benar-benar aman. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi ketiga adalah pengendalian inflasi harus dipahami sebagai kebijakan perlindungan sosial. Bagi rumah tangga rentan, stabilitas harga pangan dan kebutuhan dasar adalah faktor utama yang menentukan apakah mereka dapat bertahan di atas garis kemiskinan. Karena itu, penguatan pasokan pangan, distribusi, dan koordinasi pengendalian inflasi harus dilihat sebagai bagian dari agenda menurunkan kerentanan, bukan sekadar stabilisasi makro. ([Bank Indonesia](#))

Implikasi keempat adalah pemerataan wilayah harus menjadi prioritas inti. Selama pertumbuhan, investasi, dan kesempatan kerja formal masih terlalu terkonsentrasi, maka kerentanan akan tetap tinggi di banyak daerah. Pembangunan wilayah tidak cukup hanya berarti membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperluas pasar kerja produktif, pendidikan yang

relevan, dan kesempatan usaha di luar pusat-pusat pertumbuhan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Implikasi kelima adalah Indonesia perlu memperkuat pembentukan kelas menengah yang sesungguhnya. Itu berarti mendorong rumah tangga agar tidak hanya lolos dari kemiskinan, tetapi mampu menabung, mengakses kredit produktif, memiliki aset, dan membangun keamanan antargenerasi melalui pendidikan. Selama pekerjaan kelas menengah menyusut dan informalitas tetap dominan, maka kemajuan statistik akan terus bertabrakan dengan rasa rentan dalam kehidupan sehari-hari.

Penutup

Ekonomi Indonesia pada awal 2026 memang memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah wajah kemajuan. Kemiskinan resmi turun menjadi 8,25 persen, rasio Gini pengeluaran turun menjadi 0,363, pangsa pengeluaran 40 persen terbawah membaik, dan ekonomi tumbuh 5,11 persen. Semua ini adalah perkembangan nyata yang penting dan tidak boleh diremehkan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Wajah kedua adalah wajah kerentanan yang belum hilang. Kemiskinan perdesaan tetap tinggi, pekerjaan kelas menengah menyusut, hampir 60 persen pekerja masih informal, rata-rata upah masih terbatas, dan biaya hidup tetap dapat dengan cepat menggerus ruang aman rumah tangga. Banyak keluarga mungkin tidak lagi miskin secara resmi, tetapi belum benar-benar aman secara ekonomi. Mereka hidup dekat dengan garis risiko. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, tantangan kebijakan Indonesia bukan sekadar mempercepat penurunan kemiskinan statistik, melainkan membangun ekonomi yang membuat rumah tangga lebih tahan terhadap guncangan. Indonesia memerlukan pertumbuhan yang lebih produktif, pekerjaan yang lebih baik, harga yang lebih stabil, dan penyebaran peluang yang lebih merata. Hanya dengan itu wajah ganda ekonomi Indonesia dapat diubah: dari kemiskinan yang turun tetapi kerentanan yang bertahan, menjadi kesejahteraan yang

tidak hanya tercatat di data, tetapi juga benar-benar dirasakan di lapangan.
([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

Kemiskinan

Keadaan ketika pengeluaran per kapita seseorang berada di bawah garis kemiskinan resmi yang ditetapkan BPS. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kerentanan ekonomi

Keadaan ketika rumah tangga tidak tergolong miskin saat ini, tetapi mudah jatuh ke kemiskinan jika menghadapi guncangan pendapatan atau pengeluaran. Kesimpulan ini merupakan inferensi analitis dari data kemiskinan, upah, inflasi, dan struktur pekerjaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Rasio Gini

Ukuran statistik untuk menggambarkan ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Semakin tinggi angkanya, semakin timpang distribusinya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pangsa pengeluaran 40 persen terbawah

Bagian total pengeluaran nasional yang dinikmati oleh 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Good jobs

Pekerjaan yang produktif, lebih formal, lebih aman, dan memberi pendapatan lebih baik serta peluang mobilitas sosial.

Informalitas

Keadaan ketika pekerjaan atau usaha berada di luar perlindungan dan

regulasi formal, sehingga keamanan kerja dan pertumbuhan pendapatannya cenderung lebih lemah.

Pekerjaan kelas menengah

Pekerjaan yang menghasilkan pendapatan cukup untuk menopang standar hidup kelas menengah dan memberi ruang menabung serta menahan shock.

Ketimpangan spasial

Ketimpangan yang muncul karena perbedaan kesempatan ekonomi antarwilayah, misalnya antara Jawa dan luar Jawa atau antara perkotaan dan perdesaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Upah riil

Pendapatan pekerja setelah memperhitungkan inflasi, sehingga mencerminkan daya beli yang lebih nyata daripada upah nominal. Ini merupakan inferensi ekonomi dari data upah dan inflasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Volatile food

Kelompok komoditas pangan yang harganya mudah berfluktuasi karena sangat dipengaruhi musim, cuaca, pasokan, dan distribusi. ([Bank Indonesia](#))

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan Ada, tetapi Good Jobs Masih Kurang
- Tantangan Pasar Kerja Indonesia*

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026c). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026d). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026e). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026f). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Maret 2026 sebesar 3,48 persen*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026a). *Survei Konsumen Februari 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026b). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

World Bank. (2026). *Indonesia Country Growth and Jobs Report: Running faster, for longer*. World Bank. ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>